

## **Penerapan Collaborative Governance Antara Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata**

**Minhar Algifari<sup>1\*</sup>, Siti Atika Rahmi<sup>2</sup>, Ilham Zitri<sup>3</sup>**

<sup>12</sup> Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

<sup>3</sup> Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

Email: [algifarin43@gmail.com](mailto:algifarin43@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengembangan wisata Mata Air Tampuro di Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas pemerintah desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), masyarakat, akademisi, dan media. Analisis penelitian mengacu pada teori collaborative governance yang meliputi dialog tatap muka, kepercayaan bersama, komitmen pada proses, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi telah terjalin melalui musyawarah dan komunikasi yang melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan wisata. Kepercayaan bersama dibangun melalui keterbukaan informasi, komunikasi berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat. Komitmen para aktor terlihat dari keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan wisata, sedangkan pemahaman bersama tercermin dari kesamaan tujuan untuk meningkatkan potensi desa dan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi tersebut menghasilkan peningkatan kondisi lingkungan, perbaikan fasilitas dasar, meningkatnya partisipasi masyarakat, serta munculnya peluang ekonomi di sekitar kawasan wisata. Namun, masih terdapat kendala berupa keterlibatan masyarakat yang belum merata, pengelolaan fasilitas yang belum optimal, dan promosi wisata yang masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi, koordinasi, dan pengelolaan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan wisata yang lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Kolaborasi, Pemerintah Desa, Masyarakat, Pengembangan Wisata.

### **Pendahuluan**

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, sektor pariwisata terus mengalami perkembangan dan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional karena memiliki multiplier effect terhadap berbagai sektor lainnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu daerah yang

memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, baik wisata alam, budaya, maupun wisata berbasis masyarakat yang terus berkembang dari tahun ke tahun (Kuswandi, 2020).

Salah satu potensi wisata alam yang terdapat di Kabupaten Bima adalah wisata Mata Air Tampuro yang berada di Desa Piong Kecamatan Sanggar. Wisata ini memiliki daya tarik berupa sumber mata air alami yang berada di kawasan lereng Gunung Tambora dengan panorama alam yang masih asri. Potensi wisata tersebut dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Menurut Herdiana (2019) pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Selain itu, keberadaan wisata Mata Air Tampuro juga didukung oleh kondisi lingkungan yang masih terjaga sehingga memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Bima (Desa Piong, 2026).

Pengembangan potensi wisata tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah desa semata tetapi memerlukan keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan destinasi wisata. Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung berinteraksi dengan lingkungan wisata dan merasakan dampak dari pengembangannya. Gautama dkk. (2020) menjelaskan bahwa pengembangan wisata yang melibatkan masyarakat mampu menciptakan rasa memiliki, meningkatkan partisipasi, serta mendorong keberlanjutan pengelolaan destinasi wisata. Oleh karena itu sinergi antara pemerintah desa, Pokdarwis, masyarakat, akademisi, dan media diperlukan agar potensi wisata yang dimiliki Desa Piong dapat dikelola secara efektif serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu potensi wisata alam yang terdapat di Kabupaten Bima adalah wisata Mata Air Tampuro yang berada di Desa Piong, Kecamatan Sanggar. Destinasi wisata ini memiliki daya tarik berupa sumber mata air alami yang jernih, suasana alam yang masih asri, serta panorama kawasan lereng Gunung Tambora yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Menurut Ardin (2024) Mata Air Tampuro merupakan salah satu objek wisata yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena mampu menarik kunjungan wisatawan sekaligus menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar. Selain memiliki nilai rekreasi wisata Mata Air Tampuro juga berpotensi menjadi sarana pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi yang mendukung aktivitas pariwisata.

Pengembangan destinasi wisata tidak hanya bergantung pada keberadaan sumber daya alam, tetapi juga dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaannya. Konsep pariwisata berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan wisata sehingga manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal. Herdiana (2019) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengembangan desa wisata karena dapat meningkatkan rasa memiliki, tanggung jawab, serta keberlanjutan pengelolaan wisata. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pengembangan wisata yang berkelanjutan.

Dalam mewujudkan pengelolaan wisata yang efektif, diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait melalui pendekatan collaborative governance. Collaborative governance merupakan proses kolaborasi yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam pengambilan keputusan secara bersama guna mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai secara individual. Ansell dan Gash dalam Noor, Suaedi, dan Mardiyanta (2022) menjelaskan bahwa collaborative governance menekankan pentingnya dialog tatap muka, kepercayaan bersama, komitmen pada proses, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil sebagai unsur utama dalam membangun kolaborasi yang efektif. Pendekatan ini dinilai relevan dalam pengembangan pariwisata karena melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama.

Penelitian mengenai collaborative governance dalam pengembangan pariwisata telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian Rahman dan Zitri (2023) tentang Collaborative Governance dalam Perkembangan Pariwisata di Kawasan Senggigi Kabupaten Lombok Barat menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha melalui komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa kolaborasi yang efektif mampu meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi wisata.

Penelitian lain dilakukan oleh Adnan dan Maulid (2024) mengenai kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan Objek Wisata Tanjung Malaha Kabupaten Kolaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan wisata mampu meningkatkan keberhasilan program pengembangan wisata. Selanjutnya, penelitian Ariesmansyah, Ariffin, dan Respati (2023) tentang collaborative governance dalam pengembangan desa wisata menemukan bahwa keberhasilan pengembangan wisata ditentukan oleh dialog tatap muka, kepercayaan bersama, komitmen, dan pemahaman bersama antar aktor yang terlibat.

Penelitian oleh Muh. Arfiansyah (2024) mengenai collaborative governance dalam pengembangan destinasi pariwisata pesisir Pantai Topejawa Kabupaten Takalar menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan destinasi wisata meskipun masih menghadapi kendala pada aspek koordinasi dan konsistensi partisipasi masyarakat. Selain itu Dahribal Ashar (2024) dalam penelitiannya tentang kolaborasi antar stakeholder dalam pengembangan Wisata Karst Rammang-Rammang Kabupaten Maros menemukan bahwa keberhasilan pengembangan wisata sangat dipengaruhi oleh komitmen bersama, komunikasi yang intensif dan pembagian peran yang jelas antar aktor. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara khusus membahas penerapan collaborative governance antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengembangan wisata Mata Air Tampuro di Desa Piong. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana penerapan collaborative governance antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengembangan wisata Mata Air Tampuro serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses kolaborasi tersebut.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif yang sangat sesuai untuk menganalisis Kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Mata Air Tampuro. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi langsung terhadap para pelaku dalam konteks alami mereka, berinteraksi secara mendalam, dan menggali pemahaman subjektif atau interpretasi mereka terhadap proses kemitraan (Sugiyono, 2015). Dengan prinsip ini sebagai panduan penelitian diharapkan dapat memberikan deskripsi yang komprehensif dan mendalam mengenai bagaimana dan alasan kolaborasi tersebut terbentuk menguraikan secara spesifik peran masing-masing pihak yang terlibat yakni Pemerintah Desa, Pokdarwis, dan masyarakat serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang muncul selama upaya kolektif dalam mengembangkan destinasi wisata tersebut.

Pendekatan deskriptif ini menggunakan Teori Kolaborasi sebagai kerangka analitis utama untuk mengkaji kemitraan antara Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Mata Air Tampuro, yang bertujuan melampaui deskripsi sederhana menjadi analisis mendalam terhadap kualitas interaksi. Teori Kolaborasi yang diadaptasi dari model inter-organisasional akan memecah proses kerja sama menjadi dimensi-dimensi yang dapat diuji secara kualitatif, meliputi Pemicu (mengapa kolaborasi dimulai), Struktur dan Tata Kelola (bagaimana peran dan sumber daya diorganisasi), Proses Interaktif (bagaimana komunikasi dan pengambilan keputusan berlangsung), serta Hasil (dampak dan tantangan yang dicapai). Dengan berfokus pada dimensi-dimensi ini, penelitian akan memastikan bahwa observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan kunci (Pemerintah Desa, Pokdarwis, dan masyarakat) tidak hanya mencatat data, tetapi juga mengungkap struktur dan dinamika kolaborasi yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Dialog Tatap Muka**

Dialog tatap muka menjadi unsur penting dalam kolaborasi antara pemerintah desa, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan wisata Mata Air Tampuro. Hasil wawancara menunjukkan bahwa komunikasi dilakukan melalui musyawarah desa, rapat bersama, dan pertemuan rutin yang melibatkan berbagai pihak. Forum tersebut berfungsi sebagai ruang partisipatif untuk menyampaikan aspirasi, membahas kebutuhan, serta mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan wisata. Keterlibatan masyarakat dalam dialog ini mencerminkan adanya proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama sehingga mendorong terciptanya komunikasi yang terbuka dan partisipatif.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa dialog tatap muka berkontribusi dalam membangun kesepahaman (*shared understanding*) dan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap wisata Mata Air Tampuro. Melalui pertemuan yang dilakukan secara rutin pemerintah desa,

Pokdarwis, dan masyarakat dapat menyelaraskan persepsi mengenai tujuan dan arah pengembangan wisata. Kondisi tersebut mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga, mendukung, dan terlibat dalam berbagai kegiatan pengembangan wisata. Dengan demikian dialog tatap muka tidak hanya berfungsi sebagai media pertukaran informasi tetapi juga sebagai sarana memperkuat hubungan kerja sama antaraktor yang terlibat.

Meskipun demikian pelaksanaan dialog tatap muka masih menghadapi beberapa kendala. Hasil wawancara dengan akademisi dan media menunjukkan bahwa kolaborasi memerlukan sistem yang lebih terstruktur, pembagian peran yang jelas, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Selain itu keterlibatan media dalam proses komunikasi masih bersifat situasional sehingga fungsi publikasi dan penyebaran informasi belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu peningkatan kualitas dan konsistensi dialog tatap muka perlu dilakukan agar proses kolaborasi dapat berlangsung lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan dalam mendukung pengembangan wisata Mata Air Tampuro.

## **2. Membangun Kepercayaan Bersama**

Kepercayaan bersama merupakan elemen penting dalam mendukung kolaborasi antara pemerintah desa, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan wisata Mata Air Tampuro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan dibangun melalui keterbukaan informasi, komunikasi yang berkelanjutan, serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pengelolaan wisata. Pemerintah desa berupaya menjaga transparansi terkait perencanaan dan pelaksanaan program sehingga masyarakat dapat memahami arah pengembangan wisata yang dilakukan. Selain itu komunikasi yang terbuka dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan wisata turut memperkuat hubungan kerja sama antar pihak serta menciptakan rasa saling percaya dalam menjalankan peran masing-masing.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya telah memiliki tingkat kepercayaan yang cukup baik terhadap pemerintah desa dan Pokdarwis. Keterbukaan informasi yang diberikan mendorong masyarakat untuk lebih yakin dan aktif terlibat dalam mendukung pengembangan wisata Mata Air Tampuro. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepercayaan tidak hanya terbentuk melalui penyampaian informasi tetapi juga melalui partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pengelolaan wisata. Keterlibatan tersebut memperkuat rasa memiliki terhadap objek wisata serta mendorong terciptanya tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan pengembangannya.

Meskipun demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat belum sepenuhnya merata. Masih terdapat sebagian masyarakat yang merasa informasi terkait kegiatan dan pengambilan keputusan belum tersampaikan secara menyeluruh sehingga menimbulkan persepsi bahwa keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya terbuka. Selain itu kepercayaan yang berkelanjutan memerlukan dukungan berupa konsistensi kebijakan, sistem pengelolaan yang jelas, serta komunikasi yang lebih intensif. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan pemerataan informasi, memperkuat komunikasi, dan memperluas keterlibatan masyarakat agar kepercayaan bersama dapat berkembang lebih kuat dan mendukung kolaborasi yang berkelanjutan dalam pengembangan wisata Mata Air Tampuro.

## **3. Komitmen Pada Proses**

Komitmen pada proses merupakan faktor penting dalam menjaga keberlangsungan kolaborasi antara pemerintah desa, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan wisata Mata Air Tampuro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya mempertahankan keterlibatan secara berkelanjutan melalui koordinasi dan pengawasan dalam setiap tahapan pengembangan wisata. Komitmen tersebut mencerminkan tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola potensi wisata agar tetap berkembang secara terarah. Selain itu Pokdarwis juga menunjukkan komitmen melalui keterlibatan aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam pengelolaannya.

Partisipasi masyarakat turut menjadi indikator penting dalam menunjukkan adanya komitmen bersama terhadap pengembangan wisata. Keterlibatan masyarakat terlihat melalui berbagai kegiatan seperti kerja bakti, menjaga kebersihan lingkungan wisata, serta mendukung berbagai program yang dilaksanakan. Meskipun tingkat partisipasi masyarakat tidak selalu sama dalam setiap kegiatan terdapat kesadaran kolektif untuk tetap mendukung keberlanjutan wisata Mata Air Tampuro. Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen dalam kolaborasi tidak hanya diwujudkan melalui keterlibatan formal tetapi juga melalui kontribusi nyata dalam menjaga dan mengembangkan kawasan wisata secara berkelanjutan.

Namun demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen yang telah terbentuk masih menghadapi tantangan dalam aspek konsistensi. Akademisi dan media menilai bahwa keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada kesinambungan keterlibatan setiap pihak dalam menjalankan perannya. Tingkat partisipasi yang masih fluktuatif berpotensi memengaruhi efektivitas kerja sama apabila tidak diikuti dengan koordinasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan penguatan komitmen melalui peningkatan koordinasi, pembagian peran yang lebih jelas, serta upaya menjaga kesinambungan partisipasi seluruh aktor agar kolaborasi dalam pengembangan wisata Mata Air Tampuro dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

#### **4. Pemahaman Bersama**

Pemahaman bersama merupakan salah satu unsur penting dalam kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengembangan wisata Mata Air Tampuro. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa, Pokdarwis, dan masyarakat memiliki persepsi yang relatif sama mengenai tujuan pengembangan wisata yaitu untuk meningkatkan potensi desa dan kesejahteraan masyarakat. Kesamaan persepsi tersebut dibangun melalui sosialisasi, komunikasi, dan berbagai forum diskusi yang dilakukan secara berkelanjutan. Proses ini memungkinkan setiap pihak memahami arah pengembangan wisata serta peran yang harus dijalankan dalam mendukung keberhasilan program. Dengan demikian pemahaman bersama menjadi fondasi penting dalam menciptakan koordinasi yang efektif dan mengurangi potensi perbedaan pandangan di antara para pemangku kepentingan.

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Pokdarwis dan masyarakat menunjukkan bahwa pemahaman bersama tidak hanya terbentuk pada tingkat pengetahuan tetapi juga tercermin dalam sikap dan tindakan nyata. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan, mendukung kegiatan wisata, serta berpartisipasi dalam berbagai program pengembangan menunjukkan adanya kesadaran kolektif terhadap pentingnya keberadaan wisata Mata Air Tampuro bagi kemajuan desa. Temuan ini mengindikasikan bahwa komunikasi yang berlangsung secara intensif telah berhasil

membangun kesamaan persepsi dan rasa tanggung jawab bersama. Dalam perspektif collaborative governance kondisi tersebut mencerminkan adanya shared understanding yang menjadi salah satu prasyarat penting untuk menciptakan kerja sama yang harmonis dan berkelanjutan.

Namun demikian hasil wawancara dengan akademisi dan media menunjukkan bahwa pemahaman bersama yang telah terbentuk masih memerlukan penguatan. Meskipun tujuan pengembangan wisata telah dipahami secara umum oleh para pihak masih terdapat kebutuhan untuk memperdalam penyamaan persepsi terkait pelaksanaan program di lapangan agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi. Oleh karena itu komunikasi, sosialisasi, dan forum koordinasi perlu terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan adanya pemahaman yang semakin kuat dan merata di antara seluruh pihak kolaborasi dalam pengembangan wisata Mata Air Tampuro dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan mampu mendukung tercapainya tujuan pembangunan wisata yang berkelanjutan.

## **5. Pencapaian Hasil**

Pencapaian hasil merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan kolaborasi antara pemerintah desa, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pengembangan wisata Mata Air Tampuro di Desa Piong. Berdasarkan hasil wawancara kolaborasi yang dilakukan telah menghasilkan berbagai perubahan positif baik dari aspek fisik maupun sosial. Pemerintah desa menilai bahwa pengembangan wisata telah ditandai dengan meningkatnya kondisi lingkungan, perbaikan fasilitas dasar, serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pengelolaan wisata. Sejalan dengan itu Pokdarwis menyampaikan bahwa koordinasi antara pemerintah desa, Pokdarwis, dan masyarakat semakin baik sehingga pengelolaan wisata dapat berjalan lebih terarah dan terorganisir. Temuan ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang terjalin telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pengelolaan wisata sekaligus memperkuat hubungan kerja sama antaraktor dalam pengembangan wisata Mata Air Tampuro.

Dari perspektif masyarakat hasil pengembangan wisata mulai memberikan manfaat ekonomi melalui munculnya peluang usaha kecil dan meningkatnya aktivitas ekonomi di sekitar kawasan wisata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan wisata tidak hanya berfungsi sebagai destinasi rekreasi tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Namun demikian sebagian masyarakat menilai bahwa manfaat yang diperoleh belum dirasakan secara merata. Masih terdapat masyarakat yang belum memperoleh dampak langsung baik dari segi ekonomi maupun keterlibatan dalam kegiatan wisata. Selain itu beberapa fasilitas wisata dinilai belum terawat secara optimal sehingga kenyamanan pengunjung masih perlu ditingkatkan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kolaborasi telah menghasilkan perkembangan yang positif, distribusi manfaat dan kualitas fasilitas wisata masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan.

Pandangan akademisi dan media memperkuat bahwa pencapaian hasil kolaborasi tidak hanya diukur dari perubahan yang terlihat secara fisik tetapi juga dari kualitas pengelolaan, dampak sosial ekonomi, serta keberlanjutan hasil yang dicapai. Pengembangan wisata Mata Air Tampuro telah menunjukkan hasil yang positif namun masih memerlukan penguatan dalam aspek promosi, pengelolaan fasilitas, serta evaluasi yang berkelanjutan agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kolaborasi

antara pemerintah desa, Pokdarwis, dan masyarakat telah menghasilkan kemajuan dalam pengembangan wisata Mata Air Tampuro tetapi masih diperlukan upaya peningkatan pada aspek pemerataan manfaat, kualitas pengelolaan, dan promosi wisata agar hasil yang dicapai dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengembangan wisata Mata Air Tampuro di Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima telah berjalan melalui unsur-unsur collaborative governance yang meliputi dialog tatap muka, kepercayaan bersama, komitmen pada proses, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil. Dialog yang dilakukan melalui musyawarah desa dan forum komunikasi mampu menciptakan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kepercayaan bersama dibangun melalui keterbukaan informasi, komunikasi yang berkelanjutan, serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pengelolaan wisata. Selain itu, komitmen pemerintah desa, Pokdarwis, dan masyarakat terlihat dari keterlibatan mereka dalam setiap tahapan pengembangan wisata, sedangkan pemahaman bersama mengenai tujuan pengembangan wisata sebagai upaya meningkatkan potensi desa dan kesejahteraan masyarakat menjadi dasar dalam memperkuat koordinasi dan kerja sama antar pihak.

Kolaborasi yang terjalin telah menghasilkan berbagai dampak positif, seperti meningkatnya kondisi lingkungan wisata, perbaikan fasilitas dasar, meningkatnya partisipasi masyarakat, serta munculnya peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Namun demikian, hasil yang dicapai masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterlibatan masyarakat yang belum merata, manfaat ekonomi yang belum dirasakan secara menyeluruh, pengelolaan fasilitas yang belum optimal, serta promosi wisata yang masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan komunikasi, koordinasi, pemerataan partisipasi masyarakat, penguatan pengelolaan fasilitas, serta evaluasi dan promosi yang berkelanjutan agar pengembangan wisata Mata Air Tampuro dapat berjalan lebih efektif, optimal, dan berkelanjutan.

## **Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta atas doa, dukungan dan kasih sayang yang tiada henti. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama proses penyusunan karya ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapat balasan dari tuhan yang maha esa.

## **Referensi**

Adnan, R., & Maulid, M. (2024). Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengembangan Obyek Wisata Tanjung Malaha Kabupaten Kolaka. *Jurnal Publik*, 18(01), 48–61.

- Ardin, A. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata Mata Air Tampuro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Ariesmansyah, A., Ariffin, R. H. B., & Respati, L. A. (2023). Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal El-Riyasah*, 14(1), 58–72.
- Ayuningtyas, D., Lestari, H., & Rostyaningsih, D. (2023). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3), 13–31.
- Gautama, B. P., Yuliawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020). Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *Bernas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 355–369.
- Gautama, B. P., Yuliawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020). Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 355–369.
- Herdiana, D. (2019). Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 6(1), 63–86.
- Kuswandi, A. (2020). Strategi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 8(2), 90–113.
- Muhammad Noor, S.Sos., M.A.P., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). Collaborative Governance. Penerbit Bildung.
- Nugroho, R. (2020). Kebijakan Publik dan Manajemen Kolaborasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nursetiawan, & Supriyatno, B. (2023). Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Desa Sukamaju dalam Pengembangan Wisata Bukit Sampalan Asri Berbasis Community Based Tourism.
- Putra, W. P., & Firmanto, T. (2025). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Pariwisata Mada Oi Tampuro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(8).
- Rahman, A. F. B., & Zitri, I. (2023). Collaborative Governance dalam Perkembangan Pariwisata di Kawasan Senggigi Kabupaten Lombok Barat. *Nusantara Hasana Journal*, 3(2), 144–159.
- Sagi, S. (2024). Strategi Pengembangan Wisata Mata Air Tampuro sebagai Daya Tarik Wisata di Desa Piong Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.